

Studi Kebijakan dalam Pengadaan *Dassault Rafale* sebagai Alutsista Indonesia

Novitasari Wahyu Hastami^{1*}, Ali Zainal Abidin²

^{1*,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengadaan Dassault Rafale dari Prancis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode literature review. Pengumpulan data bersumber dari literatur seperti buku sejumlah 1 buah, 6 artikel jurnal lokal, 7 artikel jurnal internasional, kumpulan press release dan berita aktual sejumlah 27 buah, serta 4 situs resmi instansi yang terkait penelitian ini. Penelitian ini membahas pengadaan Dassault Rafale oleh Indonesia ketika terdapat aspek tidak merekomendasikannya. Hasil penelitian ini menyatakan adanya pertimbangan politik dan ekonomi yang mempengaruhi pengadaan Dassault Rafale walaupun terdapat jet tempur yang lebih canggih dan murah karena Indonesia perlu menimbang dampak buruknya pada aspek politik dan ekonomi. Dalam pengadaan Dassault Rafale, kebijakan yang diambil sangat dipengaruhi oleh politik internasional khususnya karena adanya UU CAATSA. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tetap perlu dilaksanakan, namun pemerintah juga perlu memperhatikan geostrategis di kawasan dan keadaan ekonomi dalam negeri dalam pengadaan Alutsista.

Kata kunci: CAATSA; Dassault Rafale; Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Abstract. This study aims to determine the factors that influence the procurement of Dassault Rafale from France. This research is a qualitative descriptive study using the literature review method. Data collection was sourced from literature such as books, local and international journal articles, a collection of press releases and actual news, as well as official websites of agencies related to this research. This study discusses the implementation of the Dassault Rafale procurement policy in Indonesia when some aspects do not recommend it. As a result, there were political and economic considerations that culminated in the decision to bring in the Dassault Rafale even though there are more sophisticated and cheaper fighter jets because Indonesia needs to be careful in deciding a policy, especially in considering the negative impact of politics. and economic aspects. In the procurement of the Dassault Rafale, the policies adopted were heavily influenced by international politics, especially due to the existence of the CAATSA Law. Indonesia's free and active foreign policy still needs to be implemented, but the government also needs to pay attention to regional geostrategy and domestic economic conditions in the future in the procurement of defense equipment.

Keywords: CAATSA; Dassault Rafale; Free Active Foreign Policy.

* Author. Email: noviwh1@gmail.com^{1*}, aza200@ums.ac.id²

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.953>

Received: 14 February 2023, Revision: 21 March 2023, Accepted: 15 April 2023, Available Online: 30 April 2023.

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Pendahuluan

Pembaharuan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) merupakan keperluan suatu negara dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatannya. Sebagai salah satu negara terluas di Asia Tenggara serta memiliki letak yang strategis, Indonesia perlu memiliki pertahanan yang kuat untuk menghindari adanya berbagai bentuk ancaman, salah satunya adalah ancaman militer. Indonesia memiliki geografis yang berbentuk kepulauan sehingga memerlukan armada angkatan udara yang mampu menjangkau antar pulau dengan cepat. Salah satu hal yang vital dalam armada angkatan udara adalah pesawat tempur, sehingga pengadaan pesawat tempur perlu menjadi prioritas dalam agenda pembaharuan Alutsista di Indonesia terutama ketika melihat bagaimana geostrategis Indonesia dengan negara tetangga yang memiliki armada setara atau lebih canggih daripada Indonesia. Pembaharuan alutsista juga merupakan bagian dari pemenuhan MEF (*Minimum Essential Force*) yang diamanatkan dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 5 Tahun 2010. MEF merupakan upaya standarisasi kebutuhan militer yang perlu dicapai dalam rangka pembangunan negeri di bidang pertahanan baik dari segi kekuatan, kemampuan, dan persebarannya yang kemudian menjadi salah satu indikator stabilitas keamanan (Humas Kemenko Polhukam RI, 2022). Dibawah otoritas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pada Februari 2022 Indonesia mendatangkan Dassault Rafale yang didasarkan pada kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dengan pihak Dassault Aviation selaku produsen Dassault Rafale dari Prancis. Anggaran dalam pengadaan Dassault Rafale mencapai Rp 1,63 Triliun per unit atau total Rp68,46 Triliun secara keseluruhan. Prabowo Subianto dalam keterangan press berencana untuk mendatangkan 42 unit Dassault Rafale, padahal pada wacana sebelumnya hanya mendatangkan 36 unit saja, walaupun saat ini dalam pelaksanaannya hingga Februari 2022 Indonesia baru mendatangkan 6 unit dan 36 unit lainnya dikabarkan akan segera menyusul. (Yahya, 2022).

Kesepakatan antara Indonesia dan Prancis dalam MoU (*Memorandum of Understanding*)

kerjasama pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale memuat program *offset* dan *Training of Trainer* (ToT) antara Dassault Aviation dengan PT Dirgantara Indonesia dalam hal *maintenance*, *repair* dan *overhaul* (MRO) pesawat-pesawat Prancis di Indonesia seperti Rafale yang akan datang serta Helikopter Caracal dan armada lain yang telah ada. (Agustien, 2022) *Offset* merupakan mekanisme yang sering dilakukan dalam transaksi di bidang sektor industri pertahanan dengan negara lain. *Offset* merupakan mekanisme kontra perdagangan yang mewajibkan negara pengekspor untuk melakukan transaksi pengadaan atau alih teknologi dengan negara pengimpor. (Lutfiyanah, 2017) *Offset* dalam pengadaan Dassault Rafale juga terdapat *transfer technology* yang dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi Industri Pertahanan dalam negeri. (Ahmad Afandi, 2022) Selain itu juga terdapat kerjasama di bidang pertahanan seperti pengembangan kapal selam, pengembangan telekomunikasi untuk militer, dan kerjasama pengembangan produksi amunisi. (Hariyanto, 2022) Pengadaan Dassault Rafale sebagai pesawat tempur yang akan memperkuat pertahanan Indonesia bukan hanya diputuskan berdasarkan besaran kerjasama dengan Prancis sebagai *offset* dari pengadaan, namun juga melihat kemampuan dari produknya yaitu Dassault Rafale sebagai sebuah pesawat yang dirancang serbaguna atau biasa disebut *omnirole*. Dassault Rafale menggunakan mesin ganda dengan kemampuan melakukan serangan, pengintaian serta dapat menangkal nuklir, dilengkapi dengan avionik, mampu menembakkan canon 30 mm serta memiliki bom *laser-guided* dan amunisi untuk menyerang di darat. (Dwiharpini, 2017) .

Pengadaan Dassault Rafale juga membawa tantangan baru bagi Indonesia karena sebelumnya TNI menggunakan pesawat buatan Rusia seperti Su-27 dan pesawat buatan US seperti F-15, datangnya Dassault Rafale dari produsen lain yaitu Prancis membuat Indonesia perlu mempelajari lagi bagaimana cara melakukan pelatihan baik dalam mengoperasikan pesawat maupun pemeliharaannya. Perbedaan produsen jelas berdampak pada sistem dan suku cadang yang juga berbeda dari pesawat yang dimiliki TNI sebelumnya. Pengadaan pesawat dengan

produsen yang berbeda dari sebelumnya membuat Indonesia perlu membangun fasilitas penunjang dan pelatihan SDM. Beban dari pengadaan pesawat baru tersebut akan diefisiensikan dengan memasukan kerjasama dengan produsen pesawat untuk pemeliharaan dan pelatihan ke dalam *offset* yang akan Pemerintah Indonesia sepakati dengan negara produsen (Humas PTDI, 2022). Indonesia sebelumnya memiliki pesawat dari Rusia dan US sehingga menimbulkan pertanyaan ketika tidak mendatangkan dari produsen pesawat yang sudah ada di Indonesia. Sebenarnya pada 2017 Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan Rusia untuk melakukan pengadaan 11 Sukhoi Su-35 (Idris, 2020). Pengadaan alutsista memerlukan banyak hal yang perlu diperhatikan dan tidak hanya melibatkan kementerian pertahanan, namun juga kementerian lainnya serta memerlukan proses yang panjang. Berdasarkan Permenhan No. 35 Tahun 2015, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan alutsista adalah *offset* yang merupakan pengaturan nilai kontrak kepada negara pembeli sebagai persyaratan jual beli. Mekanisme *offset* yang biasanya dilakukan oleh Indonesia adalah *joint production* dan *counter trade* sebagai upaya memajukan industri produk dalam negeri (Lutfiyah, 2017). Dalam proses pengadaan Sukhoi Su-35, Indonesia telah menyiapkan *offset* berupa *counter trade* yang mewajibkan Rusia membeli komoditas ekspor Indonesia sebesar 50% harga pengadaan Sukhoi Su-35 (Wardi, 2017). Namun kesepakatan *offset* antara Indonesia dan Rusia mengalami kendala terkait pemilihan komoditas yang belum disetujui, hal itu tentu membuat proses pengadaan Sukhoi Su-35 terhambat (Andri, 2019).

Kemampuan yang terdapat pada Sukhoi Su-35 faktanya lebih unggul daripada Dassault Rafale. Berdasarkan infografis dari *Aircraft Compare* yang dikutip oleh CNN Indonesia, Sukhoi Su-35 memiliki kecepatan maksimal 760 knot yang lebih unggul 10 knot daripada Dassault Rafale yang hanya 750 knot. Selain itu kemampuan terbang maksimal Sukhoi Su-35 juga lebih unggul daripada Dassault Rafale yaitu 55.000 kaki, lebih unggul 5000 kaki daripada Dassault Rafale yang hanya 50.000 kaki. Uniknyanya walaupun lebih unggul, Sukhoi Su-35 memiliki

harga lebih murah bahkan hampir setengah harga dari Dassault Rafale. Sukhoi Su-35 diperkirakan memiliki harga US\$ 65 juta, sedangkan Dassault Rafale diperkirakan harganya menyentuh angka US\$ 115 juta (Ikhsan, 2020). Selain itu sebuah penelitian berjudul “*Selection Of A Fighter Aircraft To Improve The Effectiveness Of Air Combat In The War On Terror: Pakistan Air Force - A Case In Point*” membandingkan beberapa pesawat tempur yang bisa menjadi pilihan bagi Pakistan menunjukan apabila berdasarkan kecepatan jelajah, kapabilitas presisi target, kemampuan manuver, ketinggian yang bisa dicapai, dan radius tembak lebih unggul Sukhoi Su-35 daripada Dassault Rafale dengan biaya akuisisi yang lebih rendah. Dassault Rafale hanya lebih baik dalam biaya operasional yang lebih murah dan perawatan yang lebih mudah, itu pun dipengaruhi oleh Pakistan yang sebelumnya memiliki banyak armada pesawat tempur Prancis seperti Dassault Mirage 5 dan Dassault Mirage III (Yousaf Ali, 2017).

Perbandingan antara Dassault Rafale dan Sukhoi Su-35 memunculkan suatu pertanyaan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia mendatangkan Dassault Rafale. Secara kemampuan dan nilai ekonomis, Sukhoi Su-35 lebih unggul dibandingkan dengan Dassault Rafale. Namun dalam pengadaan Alutsista ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan. Faktor yang mempengaruhi khususnya dalam pengadaan 42 unit Dassault Rafale akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut akan menjadi hal logis yang bisa menjelaskan dasar kebijakan Pemerintah Indonesia melakukan pengadaan Dassault Rafale dari Prancis.

Pengadaan Dassault Rafale menimbulkan pertanyaan terkait hirarki prioritas dalam pemilihan calon pesawat tempur Indonesia serta faktor yang membuat Indonesia tidak membeli pesawat dari US atau Rusia apabila sebelumnya Indonesia memiliki pesawat dari keduanya. Apalagi kemampuan dan nilai ekonomis Dassault Rafale tidak lebih unggul dengan Sukhoi Su-35 yang masuk dalam rencana pengadaan Alutsista sebelumnya. Permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut memunculkan pertanyaan tentang faktor apa

yang mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan mendatangkan Dassault Rafale sebagai pilihan pesawat tempur Indonesia?.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskripsi kualitatif menggunakan metode *literature review*. *Literature review* dilakukan oleh peneliti dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder seperti buku, artikel jurnal, artikel *press release* berita, serta situs instansi. Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 1 buku, 6 artikel jurnal nasional, 7 artikel jurnal internasional, 27 artikel dari situs berita, dan 4 artikel dari situs instansi terkait penelitian seperti pemerintahan dan lembaga swadaya. Pengumpulan data tersebut peneliti peroleh kebanyakan melalui penelusuran *online* seperti mencari buku dan artikel jurnal tak berbayar melalui laman *google scholar* dan *library genesis*. Selain itu peneliti juga melakukan penelusuran artikel berita secara deduktif dengan memperhatikan validitas situs berita serta laman situs pemerintahan dan lembaga swadaya. Penggunaan *literature review* sebagai metode penelitian memungkinkan peneliti melakukan penjelasan dan evaluasi kebijakan pengadaan Dassault Rafale dengan mengacu pada kajian lingkungan strategis dan menjabarkan peristiwa-peristiwa terkait secara runtut serta tervalidasi menggunakan data dan sumber data yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Aspek Politik Pada Pengadaan Dassault Rafale

Suatu negara dalam melakukan pengadaan Alutsista harus mempertimbangkan kajian lingkungan strategis. Kajian lingkungan strategis merupakan kajian terhadap aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan suatu kebijakan. Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam kajian lingkungan strategis antara lain aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek teknologi, dan aspek legal (Avira Durrotul Rasyida, 2022).

Aspek politik berperan banyak dalam mempengaruhi kebijakan pengadaan Dassault Rafale dari Prancis, khususnya politik internasional. Adanya konflik antara dua negara adidaya selaku produsen pesawat tempur yang sebelumnya telah Indonesia gunakan yaitu US dan Rusia berdampak pada Indonesia. Konflik tersebut muncul dikarenakan adanya tuduhan US terhadap Rusia yang dianggap telah melakukan aneksasi Krimea pada 2014. Referendum yang menghasilkan bahwa penduduk Krimea lebih memilih untuk bergabung dengan Rusia di tahun 2014 bahkan tidak diakui oleh US. (Reuters, 2014) Dampak dari perseteruan tersebut adalah munculnya sanksi UU (Undang-Undang) CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) (REVIEW, 2022).

Konflik yang terjadi di Krimea sebenarnya sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari mengingat memang kawasan Krimea syarat akan krisis identitas berdasar pada sejarah dan kondisi demografi yang banyak dihuni oleh orang keturunan Rusia serta mayoritas dihuni pengguna bahasa Rusia (Salushev, 2014). Krisis domestik di Krimea berakhir dengan diadakannya referendum oleh Parlemen Krimea pada 2014 dan menghasilkan keputusan bahwa Krimea melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia (Reditya, 2021). Adanya intervensi Rusia yang mengirimkan pasukan dalam konflik Krimea mendapat kecaman dari dunia internasional, termasuk Uni Eropa, PBB, dan US (Eropa, 2014). US pada masa pemerintahan Barrack Obama merespon dengan melakukan pencelakan VISA bagi petinggi Rusia dan Ukraina, membatalkan konsultasi pertahanan dengan Rusia, membuat *blacklist* bank dan perusahaan asal Rusia, serta membatalkan segala rencana pembicaraan perdagangan dengan Rusia (Calamur, 2014). Selanjutnya, Presiden US berikutnya, Donald Trump, pada 2017 menerapkan UU CAATSA sebagai sanksi bagi negara-negara yang dinilai melakukan kebijakan yang bermasalah secara hukum internasional, salah satunya adalah Rusia yang dinilai bermasalah karena telah melakukan aneksasi Krimea dari Ukraina (Riza, 2022).

Munculnya kebijakan CAATSA yang dilakukan US juga menjadi masalah bagi Indonesia

terkhusus dalam rencana pengadaan jet tempur sebagai pembaharuan Alutsista karena UU CAATSA juga memberlakukan sanksi bagi negara-negara yang melakukan kerjasama pertahanan dengan negara yang dinilai US bermasalah secara hukum internasional. Masalah itu muncul karena Indonesia pada 2017 dibawah Menhan Ryamizard Ryacudu sebenarnya telah menjalin kesepakatan pertahanan dengan Rusia untuk melakukan pengadaan Sukhoi Su-35, namun kesepakatan tersebut terancam oleh adanya UU CAATSA yang memberlakukan embargo bagi negara yang melakukan kerjasama pertahanan dengan Rusia.

Indonesia bukan tanpa usaha dalam menghadapi UU CAATSA. Demi menjamin keberhasilan pengadaan Sukhoi Su-35, Indonesia melalui jalur diplomasi telah mencoba membujuk US untuk melakukan pengecualian pemberlakuan CAATSA kepada Indonesia. Sekretaris Pertahanan US, James Norman Mattis pada Juli 2018, mencoba meminta keringanan kepada konggres untuk memberikan pengecualian kepada beberapa negara, yaitu Indonesia, India, dan Vietnam. Atas kabar tersebut, pemerintah Indonesia masih menahan kelanjutan kesepakatan Sukhoi Su-35 dan menunggu pernyataan resmi dari US. Akhirnya pada akhir Agustus 2018, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, bertemu dengan Mattis di US yang menjanjikan adanya garansi pengecualian untuk Indonesia, India, dan Vietnam untuk meneruskan kesepakatan dengan Rusia tanpa mengkhawatirkan sanksi dari US (Antara, 2018).

Rusia pada 2021 masih bersikeras bahwa pemenuhan kontrak pengadaan Sukhoi Su-35 ke Indonesia masih terus berjalan. Melalui juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis-Militer, Valeria Reshetnikova, menyatakan bahwa Rusia telah siap memasok 11 Sukhoi Su-35 ke Indonesia walaupun muncul berbagai tekanan ke Indonesia dari negara lain. (Jatmiko, 2021) Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dalam video wawancaranya dengan CNBC Indonesia pada 2020 menyatakan bahwa kesepakatan kerjasama pengadaan Sukhoi Su-35 dengan Indonesia

akan tetap berjalan disertai berbagai kerjasama pertahanan lain dibawah hubungan kementerian pertahanan kedua negara (Indonesia, 2020).

Tekad Rusia untuk tetap menjalankan kerjasama pertahanan bersama Indonesia dengan mengadakan Sukhoi Su-35 akhirnya gagal. Indonesia secara resmi mengumumkan pembatalan pengadaan Sukhoi-Su-35 dari Rusia. Akhir tahun pada Desember 2021 Indonesia telah sepakat mengeluarkan Sukhoi Su-35 dari daftar rencana pengadaan pesawat tempur (Giozavanti, 2021). Langkah tersebut tepat untuk menghindari dampak politik dari konflik Rusia dan barat yang semakin pelik karena semenjak November 2021 Rusia kembali terlibat konfrontasi dengan Ukraina setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelinsky mendekatkan Ukraina ke NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) (Oktarianisa, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina, 2022). Benar saja, pada 2022 perang antara Rusia dan Ukraina bergulir di kawasan Donetsk dan Luhansk yang memiliki demografi mayoritas dari etnis Rusia merasa adanya diskriminasi dari Pemerintahan Zelinsky yang memberlakukan kebijakan terkait larangan siaran Rusia dan penggunaan bahasa Rusia, hal itu diperpanas dengan isu akan didirikannya pangkalan NATO di Ukraina yang membuat Rusia juga mengerahkan militernya di kawasan perbatasan Donbass (Purushothaman, 2022). Pembatalan pengadaan Sukhoi Su-35 menjadi akhir dari dilema Indonesia dalam pengadaan Sukhoi Su-35 dari Rusia.

Menurut aspek politik, mendatangkan Sukhoi Su-35 yang sebelumnya menjadi incaran Indonesia dinilai perlu dibatalkan untuk menghindari konflik politik internasional. Maka dari itu Indonesia perlu untuk mencari alternatif dalam pengadaan pesawat tempur. Sebenarnya pilihan selanjutnya bisa saja bergulir kepada F-35 asal US yang dinilai memiliki kapabilitas setara dengan Sukhoi Su-35, namun hal tersebut secara politik juga dinilai kurang bijak karena Rusia-US sedang berada dalam hubungan yang renggang. Demi menjaga politik luar negeri bebas aktif di tengah adanya konflik antara Rusia dengan US maka lebih baik Indonesia mendatangkan pesawat tempur dari produsen selain keduanya. Secara geostrategis, pemilihan

Sukhoi Su-35 oleh Indonesia sebenarnya merupakan pilihan yang bagus karena negara tetangga seperti Singapura dan Australia telah memesan F-35 buatan Lockheed Martin dari US (Indonesia C. , 2020). Sedangkan apabila Indonesia melakukan pengadaan F-35 berdasarkan prosedur pengadaan pesawat tempur dari Lockheed Martin, Indonesia yang baru memiliki F-15 harus memesan F-16 generasi terbaru terlebih dahulu agar bisa memesan F-35 dan paling cepat membutuhkan waktu 9 tahun bagi Indonesia untuk bisa memiliki F-35 (Arbar, 2020). Hal tersebut tentu akan membuat kekuatan armada udara Indonesia tertinggal secara teknologi dari negara tetangga. F-35 dan Su-35 merupakan pesawat yang dinilai terbaik saat ini sebagai *first tier combat aircraft*. Maka ketika muncul tekanan untuk membatalkan pengadaan Sukhoi Su-35 dan Indonesia yang tidak mendatangkan F-35 merupakan kerugian bagi Indonesia secara geostrategis.

Kemampuan UU CAATSA mempengaruhi kebijakan negara lain dalam melakukan interaksi ekonomi internasional merupakan ancaman bagi perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang membuat persaingan industri lintas negara bebas dari pengaruh campur tangan negara, pada kasus ini menghadapi hambatan berupa kebijakan US yang memiliki *power* untuk melakukan ancaman dan tekanan dalam interaksi ekonomi internasional menggunakan UU CAATSA. UU CAATSA membuat negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia menjadi terhalang untuk melakukan kerjasama di bidang industri militer dan pertahanan, hal tersebut tentu merugikan Rusia dalam melakukan perdagangan militer dan pertahanan karena konsumen mereka mendapatkan ancaman dari US.

Sebagai salah satu negara yang memiliki agenda mendatangkan Sukhoi Su-35, Indonesia dirugikan atas adanya UU CAATSA dari US. Padahal US merupakan salah satu mitra strategis Indonesia yang telah memiliki 70 tahun hubungan bilateral (Kantor Juru Bicara, 2021). Hubungan US-Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan juga telah terjalin lama dan strategis khususnya pada kerjasama militer yang sifatnya teknis seperti *Military*

Assistance Program, International Military Education Training, Foreign Military Force, dan Foreign Military Financing (Sukadis, 2017). Akan menjadi kerugian bagi Indonesia ketika hubungan tersebut menjadi terkendala. Selain itu Indonesia juga dirugikan apabila melihat *offset* yang disepakati oleh Indonesia-Rusia dalam pengadaan Su-35, salah satunya adalah imbal dagang kelapa sawit, kopi, dan teh (Indonesia B. , 2022). Batalnya pembelian Su-35 juga menandakan batalnya imbal dagang yang mengikutinya, padahal komoditas sawit Indonesia juga tengah menghadapi tekanan dari Uni Eropa karena dianggap tidak memenuhi keberlanjutan ekosistem (Pratama, 2019). Kerjasama dengan Rusia dianggap mampu meningkatkan permintaan sawit Indonesia di Eropa. Permasalahan tersebut menjadikan kesepakatan pembelian Sukhoi Su-35 menjadi penting bagi industri sawit Indonesia. Secara geostrategis, Indonesia dirugikan atas mampunya negara tetangga Singapura dan Australia yang telah bisa memesan F-35 dari US yang dinilai setara dengan Su-35, sedangkan untuk mendapatkan F-35 Indonesia memerlukan prosedur pengadaan F-16 yang tentu akan memakan waktu lama dan membuat Indonesia tertinggal dengan negara tetangga. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia kehilangan potensi pasar untuk komoditas sawitnya di Eropa karena pengadaan Sukhoi Su-35 memasukkan imbal dagang sawit sebagai salah satu *offset*-nya.

Pengadaan Dassault Rafale Dan Dampaknya Bagi Indonesia

Batalnya pembelian pesawat Sukhoi Su-35 dikarenakan adanya UU CAATSA dan ancaman embargo dari US, tidak bisanya membeli F-35 dalam waktu dekat serta kepentingan menjaga politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tetap harus melakukan pemenuhan MEF. Urgensi melakukan pemenuhan MEF bisa kita lihat berdasarkan *Global Fire Power Index* khususnya di kawasan ASEAN, walaupun Indonesia menduduki peringkat ke-1 negara dengan GFP Index terkuat di ASEAN namun jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, dan Thailand (GFP, 2023). Indonesia merupakan negara terpadat sekaligus negara terluas di ASEAN sehingga perlu dipertanyakan ketika Indonesia

memiliki salah satu sektor kekuatan militer yang berada di bawah negara ASEAN lainnya. Maka dalam upaya memenuhi MEF, Indonesia pada akhirnya tetap perlu melakukan kontrak pengadaan pesawat tempur dengan produsen selain Rusia dan US demi kepentingan politik bebas aktif.

Indonesia akhirnya memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Dassault Aviation dari Prancis. Dassault Rafale termasuk jenis jet tempur generasi 4,5 dan merupakan jet yang memiliki kemampuan melakukan serangan darat, laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi serta yang terpenting pencegahan serangan nuklir (Aditya, 2022). Secara kemampuan, apabila dibandingkan dengan prioritas utama pesawat tempur sebelumnya yaitu Sukhoi Su-35 dan Lockheed Martin F-35 maka Dassault Rafale memiliki kapasitas dibawah keduanya. Dassault Rafale sendiri termasuk dalam kategori *Fighter Aircraft Low Capability*, sedangkan Sukhoi Su-35 dan Lockheed Martin F-35 termasuk dalam kategori *Fighter Aircraft High Capability* (Achmad Wardana, 2022). Berdasarkan situs Aviatia, Su-35 dinilai memiliki kemampuan manuver dan *dogfight* yang lebih baik daripada Rafale serta memiliki kemampuan jelajah dan kecepatan yang lebih unggul, bahkan Aviatia menyebut bahwa dibandingkan dengan Su-35 Rafale merupakan pesawat yang terlalu mahal dengan harga 2 kali lipat dari Su-35 (Aviatia, n.d.). Sedangkan apabila dibandingkan dengan F-35, Aviatia merangkum bahwa daya jelajah, kemampuan menembak, dan teknologi maka F-35 lebih unggul dibandingkan dengan Rafale yang hanya lebih unggul pada kemampuan manuver dan biaya operasional yang jauh lebih murah daripada pesawat tempur siluman mewah asal US tersebut (Aviatia, French Dassault Rafale vs US F-35 Lightning II Comparison, n.d.). Namun kembali lagi, pengadaan pesawat tempur memerlukan perhatian pada berbagai aspek yang mempengaruhinya khususnya dalam kasus ini adalah politik.

Negara produsen Dassault Rafale, Prancis, merupakan negara yang memiliki kemandirian untuk memproduksi Alutsista sendiri, bahkan pesawat tempur. Prancis bersedia bekerjasama dalam kesepakatan pengadaan Dassault Rafale

ke Indonesia dengan menggunakan skema *offset*. Walaupun Prancis merupakan anggota NATO yang turut sebagai sekutu US dalam konflik Rusia-US, namun Prancis memiliki politik luar negeri yang mirip dengan Indonesia dengan *Politique Indépendance* (Hariyanto, 2022). Poin tersebut membuat pembelian Dassault Rafale dari Prancis dinilai aman dari resiko penjatuhan sanksi CAATSA. Namun meski US menerapkan UU CAATSA yang menjatuhkan sanksi kepada negara yang bekerjasama dengan negara yang dikategorikan telah melakukan kejahatan internasional, Indonesia bisa saja mendapatkan nasib seperti India yang mendapat jaminan bebas dari sanksi walaupun membeli peralatan militer dari Rusia (Prastiti, 2019). Namun hal tersebut dinilai tetap beresiko secara politik maupun ekonomi tentang hubungan dikemudian hari dengan US.

Pengadaan Dassault Rafale dari Prancis terjadi tidak hanya semata karena upaya menghindari sanksi dari UU CAATSA. Selain adanya kesamaan dalam hal nilai politik luar negeri yang dibawa, Indonesia dan Prancis sebelumnya juga telah memiliki hubungan yang baik terkhusus dalam bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, pada Juli 2022 dalam memperingati Hari Bastille mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Prancis telah terjalin solid sejak 1950 dan kini semakin mengarah kepada kerjasama yang lebih strategis (Rahmat, 2022). Tahun 2012 Indonesia dan Prancis telah sepakat untuk menandatangani kerjasama di bidang pertahanan terkait dialog strategis, intelijen, operasi perdamaian, dan pemeliharaan/perbaikan serta pengadaan suku cadang *Véhicule de l'Avant Blindé* untuk kebutuhan Alutsista (RI, 2015). Selain historis, Prancis melalui pihak Dassault juga telah sepakat dalam pengadaan Rafale untuk melakukan *transfer technology* sebagai skema *offset* dari Indonesia seperti kerjasama perawatan dan pemeliharaan alutsista terkhusus pesawat tempur yang melibatkan PT Dirgantara Indonesia, memberikan asistensi dalam pengadaan alat medis sebagai fasilitas *research & development* di Universitas Pertahanan Indonesia, serta berbagai *technical support* yang terkait dengan suku cadang dan pengembangan pesawat tempur (Waskito Dwiwicaksoptuto, 2023). Menurut Andi Widjajanto seorang pakar

dan analis militer mengatakan bahwa keputusan Pemerintah Indonesia mendatangkan Dassault Rafale merupakan keputusan yang tepat, karena selain demi menghindari sanksi UU CAATSA, Dassault merupakan satu-satunya produsen pesawat tempur yang ingin melakukan *transfer technology* dengan Indonesia, hal itu tidak bisa didapatkan ketika Indonesia memilih mendatangkan F-16/F-35 dari US atau Sukhoi dari Rusia yang hanya menawarkan imbal dagang barter dalam skema *offset*-nya (Pebrianto, 2022).

Secara geostrategis, adanya rencana pengadaan F-35 oleh Malaysia, Singapura, dan Australia serta jumlah pesawat tempur yang dimiliki Singapura, Vietnam, Thailand dan Australia lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Indonesia maka kekuatan alutsista yang dimiliki Indonesia dengan mendatangkan 42 Dassault Rafale yang tergolong *fighter aircraft low capability* masih berada di bawah negara tetangga dalam upaya menciptakan *balance of power* dalam wujud pengadaan *first tier modern combat airstrike*. Namun pengadaan Dassault Rafale merupakan pilihan yang tepat apabila berkaca pada kepentingan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hal tersebut juga merupakan upaya agar Indonesia tetap mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan Rusia dan US selaku dua negara adidaya yang telah banyak menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia.

Keputusan mendatangkan Dassault Rafale dari Prancis memberikan beberapa dampak positif dan juga beberapa hal yang memberatkan Indonesia selaku konsumen seperti harga yang hampir dua kali lipat lebih mahal daripada Sukhoi Su-35 yang telah menjadi *fighter airstrike high capability*. Harga 1 unit Dassault Rafale ditaksir seharga US\$ 115 juta, sedangkan Indonesia berencana mendatangkan 42 unit Dassault Rafale, artinya paling tidak kontrak pengadaan jet tempur Rafale ini sebesar US\$ 4,83 miliar atau kurang lebih Rp 68,46 triliun, sebuah anggaran yang sangat besar. Anggaran yang diberikan untuk Kementerian Pertahanan dibawah Prabowo Subianto sebesar Rp 217 triliun, artinya untuk pengadaan pesawat tempur saja sudah mengambil 32% atau hampir sepertiga dari anggaran Kementerian Pertahanan (Idris, 2020). Alokasi anggaran

untuk pengadaan Alutsista dari Rp 217 triliun yang telah dirancang pada 2021 tersebut hanya sebesar Rp 9,3 triliun, artinya anggaran dan rencana pengadaan yang baru pesawat tempur saja memiliki selisih defisit kurang lebih Rp 59,16 triliun. Nilai yang begitu besar membuat Pemerintah Indonesia memerlukan lagi pasokan dana lebih untuk mengamankan anggaran, atas hal tersebut Kementerian Keuangan RI pada September 2022 memberikan persetujuan pinjaman luar negeri atas proposal pengadaan Alutsista TNI AU sebesar Rp 60,65 triliun (Putra, 2022).

Anggaran untuk mendatangkan 42 unit Dassault Rafale yang memerlukan pinjaman luar negeri memberi arti bahwa hutang luar negeri Indonesia akan semakin bertambah dan juga memiliki konsekuensi pada nilai rupiah murni. Pemerintah memerlukan kebijakan ekonomi lainnya yang bisa menyeimbangkan penambahan hutang luar negeri dan menjaga nilai rupiah murni agar tidak turun. Salah satu upaya adalah dengan menawarkan *offset* dalam pengadaan Dassault Rafale yang terkait dengan optimalisasi ekonomi dan sejauh ini *offset* yang terjadi baru pada tahap *Transfer of Technology* dan hal-hal yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, serta pengembangan Alutsista dan kebutuhan militer. *Offset* seperti barter komoditas bisa juga dilakukan seperti halnya pada yang hampir terjadi dengan Rusia dalam rencana pengadaan Sukhoi Su-35, hal itu bisa menambah pendapatan negara yang artinya juga meringankan beban pengadaan pesawat tempur yang memerlukan anggaran dalam jumlah besar.

Kesimpulan

Pengadaan Dassault Rafale dari Prancis merupakan kebijakan dalam upaya pemenuhan MEF yang diputuskan karena adanya beberapa pengaruh politik internasional. Salah satu hal yang mempengaruhi kebijakan pengadaan Rafale adalah adanya ancaman sanksi embargo atas dikeluarkannya UU CAATSA oleh US sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina yang membuat Indonesia perlu memikirkan kembali prioritas pembelian pesawat tempur baru yang telah direncanakan. Indonesia yang sebelumnya telah sepakat akan mendatangkan Sukhoi Su-35

dari Rusia dipaksa untuk kembali mengurungkan niatnya dalam melakukan kerjasama karena akan beresiko mendapatkan sanksi embargo dari US dan akan meregangkan hubungan bilateral dengan US. Pesawat tempur yang dinilai memiliki kemampuan setara dengan Sukhoi Su-35 sebagai *first tier modern combat aircraft* adalah F-35 dari US, namun untuk mendatangkannya Indonesia memerlukan beberapa persyaratan yang membebaskan. Selain itu mendatangkan F-35 juga berpotensi merenggangkan hubungan Indonesia dan Rusia, maka dalam upaya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif Indonesia perlu untuk menjatuhkan pilihan calon pesawat tempurnya pada produsen selain Rusia dan US.

Adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis dalam bidang pertahanan yang telah terjalin lama dan kesamaan nilai politik luar negeri yang dibawa pada akhirnya berpengaruh pada jatuhnya pilihan Indonesia untuk mendatangkan Dassault Rafale buatan Prancis. Selain itu Rafale juga merupakan pesawat tempur yang dinilai masih bisa bersaing dengan Sukhoi Su-35 dan Lockheed Martin F-35 walaupun berada pada kategori *fighter aircraft low capability* dan Prancis juga menawarkan *offset* pengadaan yang cukup menarik bagi kemajuan kekuatan pertahanan Indonesia dengan adanya *transfer of technology* dan kerjasama pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan Alutsista. Namun pengadaan Dassault Rafale juga menimbulkan kekhawatiran akan besarnya anggaran pengadaan karena harga jet tempur Rafale hampir dua kali lipat dari Sukhoi Su-35 dan tidak ada opsi barter maupun kerjasama ekonomi potensial yang ada dalam skema *offset* Indonesia-Prancis. Besarnya anggaran tersebut pada akhirnya membuat Indonesia memerlukan pinjaman luar negeri dengan nilai yang cukup besar dan beresiko memberikan konsekuensi pada nilai rupiah murni.

Daftar Pustaka

- Kantor Juru Bicara. (2021, Desember 12). *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. Retrieved from Hubungan Amerika Serikat-Indonesia”, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/hubungan-amerika-serikat-indonesia/>
- Achmad Wardana, e. (2022). “Review of Indonesian government policy in procurement plan of Dassault Rafale Fighter Aircraft . *Defense and Security Studies Original Research* .
- Aditya, R. (2022, Februari 11). *Jet Tempur Dassault Rafale: Ini Spesifikasi, Keunggulan, dan Harga Alutsista yang Diborong Menhan Prabowo*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2022/02/11/164127/jet-tempur-dassault-rafale>
- Agustien, U. S. (2022). Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Prancis Dalam Memenuhi Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019. *Moestopo Journal International Relations*, 77-90. Retrieved from Moestopo Journal International Relations .
- Ahmad Afandi, D. S. (2022). Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process untuk Penentuan Karakteristik Combat Aircraft dalam Rangka Mendukung Industri Pertahanan Nasional. *Journal of Science and Technology*.
- Andri, Y. (2019, Februari 14). *Pembelian Sukhoi SU-35 Tak Berjalan Lancar, Ini Alasannya*. Retrieved Januari 15, 2022, from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/12/888871/pembelian-sukhoi-su-35-tak-berjalan-lancar-ini-alasannya>

- Antara. (2018, Agustus 18). *US Guarantees to Not Sanction Indonesia for Buying Sukhoi*. Retrieved from Tempo: <https://en.tempo.co/read/921205/us-guarantees-to-not-sanction-indonesia-for-buying-sukhoi>
- Arbar, T. F. (2020, November 3). *Mohon Maaf! RI Belum Bisa Dapat Jet Tempur 'Siluman' F-35 AS*, *CNBC Indonesia*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201103170001-4-199027/mohon-maaf-ri-belum-bisa-dapat-jet-tempur-silum>
- Aviatia. (n.d.). *Dassault Rafale vs Sukhoi SU-35 Comparison*. Retrieved from Aviatia: <https://aviatia.net/rafale-vs-su-35/>
- Aviatia. (n.d.). *French Dassault Rafale vs US F-35 Lightning II Comparison*. Retrieved from Aviatia: <https://aviatia.net/dassault-rafale-vs-f-35-lightning-ii/>
- Avira Durrotul Rasyida, I. N. (2022). The Impact of Strategic Environment on Indonesia Arms Procurement. *International Journal of Business Management and Technology*.
- Calamur, K. (2014, Maret 7). *U.S. Steps In Response To Russia's Intervention In Ukraine*. Retrieved from NPR: <https://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/07/287278214/u-s-steps-in-response-to-russias-intervention-in-ukraine>
- Dwiharpini, D. C. (2017). Transformasi Dalam Performa Pesawat Terbang di Generasi Berbeda. *Bina Teknika*, 5.
- Eropa. (2014, Maret 19). *AS, Eropa Kecam Aneksasi Rusia atas Krimea*. Retrieved Januari 17, 2022, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/as-eropa-kecam-aneksasi-rusia-atas-krimea/1874186.html>
- GFP. (2023, Januari 17). *Asian Military Strength (2023)*. Retrieved from GFP: <https://www.globalfirepower.com/count-ries-listing-asia.php>
- Giozavanti, A. (2021, Desember 23). *Indonesia excludes Su-35 from fighter aircraft acquisition plans*. Retrieved from Janes: <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indonesia-excludes-su-35-from-fighter-aircraft-acquisition-plans>
- Hariyanto, S. (2022). Kerjasama Industri Pertahanan melalui Pengadaan Jet Rafale untuk Memperkuat Pertahanan Indonesia. *Journal of Industrian Engineering & Management Research*.
- Humas Kemenko Polhukam RI . (2022, Agustus 3). *MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan Diperlukan Untuk Wujudkan Kekuatan Pertahanan RI*. Retrieved Desember 18, 2022, from Polkam.go.id: <https://polkam.go.id/mef-kontribusi-industri-pertahanan-diperlukan-untuk-wujudkan-kekuatan/>
- Humas PTDI . (2022, Oktober 2). *PTDI-Dassault Rafale Aviation Kerjasama Program Offset dan ToT Pesawat Tempur Rafale depan Menteri Pertahanan RI dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis*. Retrieved Januari 12, 2023, from PT Dirgantara Indonesia (Persero): https://www.indonesian-aerospace.com/press/detail/203_ptdi-dassault+aviation+kerja+sama+program+offset+dan+tot+pesawat+tempur+rafa le+depan+menteri+pertahanan+ri+dan+menteri+angkatan+bersenjata+republik+perancis
- Idris, M. (2020, Agustus 22). *Ini Rincian Rencana Pembelian Senjata TNI oleh Prabowo di Tahun 2021*. Retrieved November 12, 2020, from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2020/08/22/110847926/ini-rincian-rencana-pembelian-senjata-tni-oleh-prabowo-di-t>

- Ikhsan, M. (2020, Januari 27). *INFOGRAFIS: Perbandingan Dassault Rafale dengan Sukhoi SU-35*. Retrieved Januari 17, 2023, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200126092214-202-468749/infografis-perbandingan-dassault-rafale-dengan>
- Indonesia, B. (2022, Agustus 8). *Barter minyak samit dengan Sukhoi 'strategi bagus' sekaligus 'bermasalah'*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40853946>
- Indonesia, C. (2020, Maret 17). *CNN Indonesia*. Retrieved from Diancam AS, RI Terancam Batal Beli Sukhoi Su-35 Rusia: (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200317132132-106-484174/diancam-as-ri-terancam-batal-beli-sukhoi-su-35-rusia>)
- Indonesia, C. (2020, Februari 20). *Live! Dubes Rusia Buka-bukaan soal Pesanan Sukhoi RI*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200220092234-4-139204/live-dubes-rusia-buka-bukaan-soal-pesanan-sukhoi-ri>
- Jatmiko, B. P. (2021, Juli 22). *Meski Indonesia Dapat Tekanan, Rusia Siap Pasok 11 Jet Tempur Su-35*. Retrieved from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2021/07/22/073000526/meski-indonesia-dapat-tekanan-rusia-siap-pasok-11-jet-tempur>
- Lutfiyannah, S. J. (2017). Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi Dan Degaussing Di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan*.
- Oktarianisa, S. (2022, Maret 4). *Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/2>
- Pebrianto, F. (2022, Februari 16). *Analisis Militer Ungkap Keuntungan Kemenhan Beli Rafale Ketimbang Sukhoi atau F-16*. Retrieved from Tempo : <https://nasional.tempo.co/read/1561396/analisis-militer-ungkap-keuntungan-kemenhan-beli-rafale-ketimbang>
- Prastiti, D. N. (2019). Countering America's Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement. *Global Strategis*.
- Pratama, A. D. (2019). Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit. *Journal Politika*, 101.
- Purushothaman, U. (2022). Ukraine and beyond: The US Strategies towards Russia. *NLAS-Europe Studies Brief*.
- Putra, E. P. (2022, November 16). *Kemenkeu Setujui Pinjaman Asing Rp 60,65 Triliun untuk Pembelian Jet Rafale*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/rlewm0484/kemenkeu-setujui-pinjaman-asing-rp-6065-triliun-unt>
- Rahmat, Y. (2022, Juli 15). *Sejak 1950 Hubungan Kerja Sama Indonesia - Perancis Solid dan Kuat*. Retrieved from Info Publik: <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/649560/sejak-1950-hubungan-kerja-sama-indonesia-perancis-so>

- Reditya, T. H. (2021, Oktober 30). *Krisis Crimea: Sejarah dan Keterlibatan Rusia*. Retrieved Januari 17, 2022, from Kompas: <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/30/165119870/krisis-crimea-sejarah-dan-keterlibatan-rusia?page=all>
- Reuters. (2014, Maret 9). *U.S. won't recognize Crimea annexation: security official*. Retrieved Januari 17, 2022, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-idUSBREA280GK20140309>
- Review, A. (2022, Oktober 22). *Rusia ditekan AS dari dua sisi: CAATSA untuk calon pembeli dan sanksi untuk Moskow*. Retrieved Januari 10, 2023, from AIRSPACE REVIEW: <https://www.airspace-review.com/2022/10/22/rusia-ditekan-as-dari-dua-sisi-caatsa-untuk-c>
- RI, K. P. (2015). BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA. In K. P. RI, BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2015 (pp. 83-84). Indonesia: Kementerian Pertahanan RI.
- Riza, B. (2022, Januari 17). *Ini 6 Negara yang Terkena Sanksi Amerika Serikat*. Retrieved from Tempo: <https://dunia.tempo.co/read/1120836/ini-6-negara-yang-terkena-sanksi-amerika-serikat/full&view=ok>
- Salushev, S. (2014). Annexation of Crimea: Causes, Analysis and Global Implications. *Global Societies Journal*.
- Staff, R. (2014, Maret 9). *U.S. won't recognize Crimea annexation: security official*,. Retrieved Januari 17, 2022, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-idUSBREA280GK20140309>
- Sukadis, B. (2017). Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat. *Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 92-93.
- Wardi, R. (2017, Agustus 22). *Beli 11 Sukhoi, RI Bayar Separuhnya dengan Komoditas Senilai Rp 7,6 T*. Retrieved Januari 15, 2022, from Berita Satu : <https://www.beritasatu.com/ekonomi/448596/beli-11-sukhoi-ri-bayar-separuhnya-dengan-komoditas-senilai-rp->
- Waskito Dwiwicaksoputro, e. (2023). Transfer of Technology Process between Indonesia and France. *International Journal of Social Science Reasearch and Review*, 312-319.
- Yahya, A. N. (2022, Februari 11). *Langkah Maju Modernisasi Alutsista TNI, Bakal Borong 42 Jet Rafale hingga 2 Kapal Selam Prancis*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/08325871/langkah-maju-modernisasi-alutsista-tni-bakal-borong-42-jet-rafale-hingga-2>
- Yousaf Ali, d. (2017). Selection Of A Fighter Aircraft To Improve The Effectiveness Of Air Combat In The War On Terror: Pakistan Air Force - A Case In Point. *Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 20.